

**PENGARUH PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD
(Studi Empiris Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan)**

¹ Alif Faruqi Febri Yanto,
¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol
aliffaruqi658@gmail.com

ABSTRACT

Abstract. This study aims to analyze empirical evidence of the effect of the whistleblowing system on the relationship between acts of fraud. Data collection was carried out by distributing questionnaires to Pasuruan Regency education office employees who had worked for more than 2 (two) years. Data analysis was carried out by simple linear regression analysis with the help of the SPSS 23 software program and the test results indicated that there was empirical evidence of the application of the whistleblowing system to the intensity of acts. This indicates that employees of the Pasuruan district education office who have high independence tend to pay attention to the existence of a whistleblowing system to prevent acts of fraud.

Keywords: Whistleblowing system, fraud prevention

A. PENDAHULUAN

Kasus penipuan masih menjadi masalah besar di Indonesia. The Association of Certified Fraud Examiners (2017) menyatakan bahwa fraud merupakan bahaya laten yang mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Kerugian fraud di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kasus korupsi, yakni rata-rata 100 hingga 500 juta per kasus. Indonesia Corruption Watch (2021) melaporkan bahwa kasus korupsi dan fraud mayoritas terjadi di sektor pemerintahan. Pernyataan tersebut sejalan dengan laporan akhir Indonesia Corruption Watch (ICW) 2019 bahwa ada 213 ASN yang menjadi tersangka kasus korupsi pada 2019. Dalam beberapa laporan tahunan, ICW menunjukkan bahwa ASN mendominasi jumlah tersangka korupsi. dan kasus penipuan. Bentuk-bentuk kecurangan yang ada di instansi pemerintah antara lain penyalahgunaan aset,

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meminimalisir tindakan kecurangan dan korupsi, mulai dari perbaikan good governance hingga pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku kecurangan dan korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah penetapan Zona Integritas. Zona Integritas menuntut agar semua instansi pemerintah menerapkan Kawasan Bebas Korupsi dan Kawasan Birokrasi yang Bersih dan Melayani. Salah satu proses wajib yang harus dilalui instansi dalam membangun zona integritas adalah penerapan Whistleblowing system (Jayanti,2019).

Gagalnya prosedur L/C BNI pada tahun 2003, diawali dengan diterimanya L/C senilai Rp 1,7 triliun oleh Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Kasus ini dilaporkan oleh Kepala Divisi Internasional pada tanggal 7 Agustus 2003 terkait kegagalan prosedur L/C BNI. Kemudian Dirut BNI mengirimkan tim auditor internal untuk mengusut kasus ini. Hasil laporan tim internal audit pada September 2003 membenarkan kasus ini dengan ditemukannya kasus pembobolan Rp. 1,7 triliun dana negara (Astini, 2021). Beberapa kasus penipuan yang terjadi di perbankan adalah pembobolan Kantor Kas Tamini Square Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 13 Oktober 2010 yang melibatkan seorang pengawas yang dibantu empat tersangka dari eksternal perbankan. Modusnya dilakukan dengan membuka rekening atas nama bank eksternal kemudian mentransfernya ke rekening tersebut. Selain itu, Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter menggelapkan dana dengan cara mentransfer dana ke rekening pribadi sebesar Rp 2,5 miliar. Kemudian, kasus pencairan dana deposito dan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri yang melibatkan lima tersangka, salah satunya customer service bank dengan memalsukan tanda tangan pada slip penarikan kemudian mentransfer ke rekening tersangka dengan kerugian sebesar Rp. 18 miliar (Nudianti, 2018). Seperti Agus Condro dalam kasus suap BI, Endin Wahyudin dalam kasus suap yang melibatkan tiga hakim agung, dan Yohanes Waworuntu dalam kasus suap Sistem Administrasi Badan Hukum. Perusahaan publik yang telah memiliki dan menerapkan whistleblower system adalah PT. Telkom, Pertamina, United Tractors, dan Grup Astra. Implementasi 6 teknis whistleblower system di PT. Telkom dan Pertamina dilakukan oleh pihak ketiga yang dialihdayakan (Yunawati, 2018).

Penelitian Yunawati (2018) melakukan studi kasus mengenai dampak penerapan Whistleblowing System terhadap internal fraud di PT. Bank Asia Tengah.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Whistleblowing System pada entitas perbankan masih belum mampu menurunkan tingkat internal fraud yang terjadi. Pamungkas et al (2017) memperoleh hasil penelitian yang berbeda yaitu Whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pencegahan financial statement fraud.

Alfian (2018) mengemukakan bahwa salah satu kunci keberhasilan penerapan whistleblowing system adalah Sumber Daya Manusia. Whistleblowing System tidak akan berjalan tanpa adanya integritas yang baik dari SDM entitas itu sendiri (Peltier-Rivest, 2018). Integritas yang baik terbentuk salah satunya dari sikap kemandirian. Sartika dan Mulyani (2020) menyatakan bahwa independensi merupakan kunci objektivitas dan integritas sehingga faktor ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan whistleblowing system pada suatu entitas.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dalam mewujudkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sebagai lembaga terpercaya dengan kinerja unggul, upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan adalah menerapkan Whistleblowing System. Whistleblowing System merupakan sistem yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang sangat penting dipengaruhi oleh partisipasi langsung semua pihak dan dukungan penuh dari Pimpinan Perusahaan. Whistleblowing system merupakan sarana untuk melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau dapat merugikan pihak lain sebagai pemangku kepentingan, sistem ini disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkannya. Pelapor dapat melaporkannya dengan identitas atau tanpa identitas atau anonim dengan membawa bukti awal sehingga dapat ditindaklanjuti. Manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan akan melindungi identitas pelapor atau pelapor atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan dan memastikan kerahasiaan identitas tetap terjaga dan fokus pada laporan yang disampaikan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berkomitmen secara konsisten dan tegas, sebagai upaya mewujudkan lembaga pemerintahan yang akuntabel dan amanah dengan kinerja unggul. Manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan akan melindungi identitas pelapor atau pelapor atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan dan memastikan kerahasiaan identitas tetap terjaga dan fokus pada laporan yang disampaikan. Dalam pelaksanaannya,

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berkomitmen secara konsisten dan tegas, sebagai upaya mewujudkan lembaga pemerintahan yang akuntabel dan amanah dengan kinerja unggul. Manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan akan melindungi identitas pelapor atau pelapor atas pengaduan pelanggaran yang disampaikan dan memastikan kerahasiaan identitas tetap terjaga dan fokus pada laporan yang disampaikan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berkomitmen secara konsisten dan tegas, sebagai upaya mewujudkan lembaga pemerintahan yang akuntabel dan amanah dengan kinerja unggul.

Teori Segitiga Kecurangan

Menurut ACFE Indonesia (2020) fraud terdiri dari korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, Cressey (1950) merumuskan tiga alasan munculnya kecurangan dalam teori segitiga kecurangan. Hal pertama yang dapat menyebabkan penipuan adalah tekanan. Adanya masalah atau kepentingan pribadi menjadi alasan untuk melanggar amanah. Faktor berikutnya adalah peluang. Orang yang dipercaya untuk menjalankan kewajiban tertentu dapat berpeluang menjadi pelaku penipuan. Oleh karena itu, orang-orang dalam posisi tersebut memiliki kewajiban untuk tidak melanggar kepercayaan yang diberikan oleh organisasi dengan mengambil keuntungan pribadi dan wajib menjaga etika etika yang patut diteladani. Faktor terakhir adalah rasionalisasi (rasionalisasi).

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Komite Nasional Tata Kelola mendefinisikan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat menindak pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia atau rahasia. Tuanakotta (2010) menyatakan bahwa pada dasarnya whistleblower adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), namun tidak menutup kemungkinan pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat).

Whistleblowing System untuk Pencegahan Fraud

Whistleblowing didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi terhadap tindakan ilegal yang dilakukan untuk menguntungkan pelaku dan merugikan individu atau organisasi (Near & Miceli, 1985). Pelaku whistleblowing disebut dengan whistleblower, yaitu anggota organisasi yang melaporkan tindakan curang kepada sistem whistleblowing secara anonim. Whistleblowing system

merupakan bagian dari pengendalian organisasi berupa saluran pelaporan agar pegawai merasa aman untuk melaporkan kecurangan. Penipuan adalah tindakan menipu seseorang atau organisasi yang terencana dan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan materi (Sartika & Mulyani, 2020). Alfian (2018) menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat atau sistem pelaporan yang tersedia bias. Selain itu, seseorang'

Suatu organisasi perlu mendorong penggunaan saluran whistleblowing melalui sosialisasi kepada anggotanya dan memberikan jaminan bahwa pelapor bebas dari ancaman sehingga organisasi tidak rentan terhadap kecurangan (Idris & Babangida, 2021; Near & Miceli, 1996). Oleh karena itu, penerima pengaduan harus memiliki kewenangan dan pelapor harus mendapatkan perlindungan yang ketat dari ancaman pelaku (Pittroff, 2014). Penelitian (Anandya, 2020), (Yunawati, 2018), Alfian (2018) serta Sartika dan Mulyani. (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara whistleblowing system dengan pencegahan fraud. Namun, hasil penelitian Sujana et al. (2020) menyatakan sebaliknya yaitu tidak adanya pengaruh antara whistleblowing system dengan pencegahan pelanggaran.

H1 = Whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

B. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang berjumlah 130 orang. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah minimal 100 orang anggota Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan informasi dengan kriteria tertentu yaitu pegawai yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun yang dianggap memiliki pengalaman kerja yang cukup. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. . Kuesioner menggunakan pilihan jawaban skala likert 5 poin yaitu poin 1 untuk sangat tidak setuju hingga poin 5 untuk sangat setuju. Penelitian ini menggunakan 1 variabel independen yaitu whistleblowing system dan menggunakan teknik analisis SPSS 23.0 atau analisis berbasis regresi linier sederhana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi Product moment Pearson, yaitu membandingkan koefisien korelasi total item r hitung dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka suatu instrumen dapat dinyatakan valid.

Tabel 1

Uji Validitas

Variabel	Hitung-R	Tabel-R	Keterangan
X1.1	0,765	0,1654	Valid
X1.2	0,753	0,1654	Valid
X1.3	0,862	0,1654	Valid
X1.4	0,877	0,1654	Valid
X1.5	0,770	0,1654	Valid
Y1.1	0,803	0,1654	Valid
Y1.2	0,758	0,1654	Valid
Y1.3	0,880	0,1654	Valid
Y1.4	0,895	0,1654	Valid
Y1.5	0,835	0,1654	Valid

Sumber : Output SPSS 23.

Berdasarkan hasil uji validitas, hasil r hitung item pertanyaan ke-1 hingga ke-6 menunjukkan nilai berkisar antara 0,753 hingga 0,895 dan nilai r tabel sebesar 0,1654. Hal ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel independensi adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi alat ukur, dalam hal ini angket atau angket. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki koefisien di atas 0,6 (Ghozali, 2018).

Variabel	Alfa Cronbach	Keandalan	Keterangan
X1	0,780	0,600	Reliable
X1	0,778	0,600	Reliable

Sumber : Output SPSS 23.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha jika item dihapus untuk semua item pertanyaan berkisar antara 0,780 hingga 0,778 dan Cronbach's Alpha adalah 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua item reliabel karena melebihi nilai Alpha Cronbach.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji Kolmogorov Smirnov dilakukan terhadap nilai sisa. Jika uji Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikansi > 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka residual model regresi berdistribusi normal. Berikut hasil uji Kolmogorov Smirnov untuk nilai sisa:

Tabel 3

Nilai uji normalitas

TIDAK	Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel	Sig
1	Asimp. Sig. (2-ekor)	0,260c,d

Sumber: Output SPSS 23.

. Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa nilai Asymp. Sig dengan nilai signifikansi 0,260 dan nilai diatas taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi pencegahan penipuan berdistribusi normal.

Uji Multikolonaritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 4

Nilai uji multikoleonaritas

Statistik Kolinearitas	
Toleransi	VIF
0,421	2.213
0,494	1.538

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4 di atas diperoleh nilai tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Sedangkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama dengan nilai VIF yaitu tidak lebih dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah uji Glejser melalui regresi nilai mutlak residual dengan variabel bebas. Nilai sig dibandingkan dengan 0,05. hasil statistik dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5

Nilai Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Pemahaman Pajak (X1)	0,707

Sumber: Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 5, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki signifikansi statistik yang mempengaruhi variabel dependen atau nilai absolut dari residual. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi di atas 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan oleh nilai Adjusted R square.

Tabel 7

Nilai Koefisien Determinasi (R-Square)

Variabel	R persegi	R Square yang disesuaikan
Pencegahan Penipuan (Y)	0,890a	0,825

Sumber : Output SPSS 23.

Hasil perhitungan regresi pada tabel 7 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi (R square) yang diperoleh sebesar 0,890. Artinya 89,0% pencegahan fraud dipengaruhi oleh variabel independen whistleblowing system (X1), sedangkan sisanya sebesar 11,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Parsial (T-Test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial menjelaskan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) untuk whistleblowing system (X1) dan fraud prevention (Y). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen (hipotesis diterima).

Tabel 6
Nilai Uji-T

Variabel	Koefisien tidak standard		T	Sig.
	B	St. Kesalahan		
(Konstan)	2.543	1.753	1.451	0,150
Sistem Whistleblowing	0,248	0,113	2.191	0,030

Sumber : Output SPSS 23.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diperoleh hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut.

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap intensitas fraud menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,030 ($<0,05$) dan nilai beta pada Unstandardized Coefficients bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan whistleblowing system berpengaruh terhadap variabel fraud dan hipotesis pertama terdukung.

Pengaruh Sistem Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil pengujian empiris menghasilkan bahwa aktualisasi whistleblowing system berpengaruh terhadap perilaku tindak kecurangan. Temuan hasil yang menarik dari penelitian ini adalah interaksi dari penerapan whistleblowing system terhadap intensitas tindak kecurangan selama penerapan whistleblowing system adalah negatif dan searah. Hal ini tidak bertolak belakang dari asumsi awal bahwa semakin baik penerapan whistleblowing system dalam suatu entitas maka tindak kecurangan dalam suatu entitas juga semakin menurun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Penelitian (Anandya, 2020), (Yunawati, 2018), Alfian (2018) serta Sartika dan Mulyani. (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara whistleblowing system dengan pencegahan fraud. Namun, hasil penelitian Sujana et al. (2020) menyatakan sebaliknya yaitu tidak adanya pengaruh antara whistleblowing system dengan pencegahan pelanggaran.

D. SIMPULAN (Arial, 12pt Bold)

Whistleblowing system yang efektif sanggup menekan terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tentang kebijakan perlindungan pelapor, prosedur pelaporan yang objektif serta evaluasi dan perbaikan yang dijalankan guna mendorong efektivitas whistleblowing system sehingga akan meningkatkan partisipasi whistleblower untuk lebih berani melakukan dalam melaporkan kecurangan yang diketahuinya. Artinya whistleblowing system mampu mengurangi budaya diam menuju kearah budaya kejujuran dan keterbukaan yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia. 2020. Survey Fraud Indonesia 2019. Diakses secara online : <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2020/07/SURVEIFRAUD-INDONESIA-2019.pdf>. Diakses pada tanggal 4 November 2020.
- Alfian, N. S. R. P. R. (2018). Penerapan Whistleblowing System Dan Surprise Audit Sebagai Strategi Anti Fraud Dalam Industri Perbankan. *Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Anandya, K, C, R,. .2020. Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol. 10 No. 2
- Astini, D. A., 2021. Pengaruh Kompetensi SDM, Awig-Awig dan Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan). *Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata. Universitas Hindu Indonesia*. e-ISSN : 2798 – 8961.
- Bishop, T. J. ., Bloom, C. A., Carcello, J. V., David L. Cotton, & Holly, D. (2016). *Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide*. IIA, AICPA, ACFE.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020*. In [Www.Antikorupsi.Org](http://www.Antikorupsi.Org).
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardani, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117–1131.

- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN - SPP (WHISTLEBLOWING SYSTEM – WBS) 2008. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance. Retrieved from <http://www.knkgindonesia.org/>.
- Maisaroh., Nurhidayati. 2021. Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance, dan Whistleblowing System Terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1 (1), h: 23-36.
- Nudianti, I. T. F. I. (2018). Pengaruh Kolektivisme, Komitmen Organisasi, Dan Penalaran Moral Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing Pada Pt. Bank Bri (Persero), Tbk. Cabang Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 15–25.
- Peltier-Rivest, D. (2018). A model for preventing corruption. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 545–561.
- Sartika, D. dan Mulyani, F. 2020. Pengaruh Sifat Machiavellian, Lingkungan Etika, Komitmen Organisasi, Dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing (Studi Empiris Pada Bpkad Di Kota Padang). *MENARA Ilmu*. 14(1): 24–39.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif-2*. Jakarta: Salemba.
- Yunawati, S. (2018). Dampak Penerapan Whistleblowing System terhadap InternalFraudPada PT. Bank Central Asia Periode 2014 –2017, 7(3).